

BAB IV

KEKUATAN, KENDALA, TANTANGAN DAN PELUANG

Pada uraian dalam bab-bab sebelumnya, bahwa berbagai isu pokok di bidang kependudukan yang meliputi indikator pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga serta penataan data base dan informasi penduduk memperlihatkan masih adanya tingkat kesenjangan yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Artinya di masa mendatang Kota Bima dihadapkan pada persoalan-persoalan untuk pemeratakan hasil-hasil pembangunan.

Oleh sebab itu perlu dikaji dan dianalisa berbagai kondisi baik dari aspek faktor internal (kekuatan dan kelemahan) maupun faktor eksternal (tantangan, dan peluang) dalam upaya pembangunan kependudukan di Kota Bima.

4.1 Kekuatan

Dalam menentukan kebijakan Pembangunan Kependudukan di Kota Bima saat ini maupun yang akan datang perlu dikaji dan dipahami kekuatannya antara lain :

1. Dalam aspek kuantitas penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk yang berada pada posisi 2,1 % setiap tahunnya, dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yang masih berada di atas 2,5 % bahkan ada yang diatas 2 % dan dengan adanya upaya penurunan Total Fertility Rate (TFR) sekitar 2,3 anak pada tahun 2015 menjadi 4,0 anak pada tahun 2020, dimana penurunan TFR tersebut merupakan kontribusi dari meningkatnya jumlah PUS yang ber KB sebanyak 86,64 % dengan mix kontrasepsi jangka panjang (MKJP) sebesar 53,8 %, disamping itu terjadi peningkatan usia kawin pertama bagi perempuan sebesar 22,3 tahun.
2. Struktur umur penduduk muda yakni adanya penduduk usia dibawah 15 tahun yang cukup besar di atas 45 % yang memberikan peluang untuk mendapatkan potensi akan tersedianya kelompok

penduduk usia muda yang terampil dan mandiri dimasa yang akan datang.

3. Rata-rata lama sekolah Kota Bima yakni 10,14 tahun tingkat partisipasi penduduk perempuan usia 7-12 tahun yang bersekolah SD dan usia 13-16 tahun yang bersekolah di SLTP masing masing sebesar 100 %.
4. Dari segi kualitas kesehatan adanya kondisi yang sudah mulai membaik jika dilihat dari Gizi buruk hanya 6 kasus tahun 2016 dibandingkan jumlah kelahiran bayi sebanyak 3.248 jiwa pada tahun 2016 dan bayi yang lahir dengan gizi buruk tersebut langsung dilakukan perawatan.
5. Dari aspek ekonomi penduduk, terdapat penurunan penduduk miskin dengan persentase dibawah angka dua digit atau dibawah 10 persen yakni sebesar 9,78 %, dan dengan PDRB atas dasar harga konstan yang setiap tahunnya terus meningkat dari Rp. 325.619.000,- pada tahun 2014 menjadi Rp. 3.57775.000,- pada tahun 2016.
6. Mobilitas penduduk Kota Bima cenderung lebih banyak yang masuk (migrasi In) dibanding yang keluar (migrasi Out), hal demikian berpotensi mendapatkan penduduk dengan usia produktif, dan akan menjadi tenaga kerja yang produktif, kecenderungan terjadinya Migrasi masuk hanya berlangsung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, dan mulai tahun 2015 terjadi sebaliknya yakni penduduk keluar sudah mulai lebih besar dibandingkan dengan penduduk yang masuk.
7. Dalam bidang Pembangunan Keluarga di Kota Bima telah memiliki data mikro keluarga sehingga dapat diketahui jumlah keluarga yang telah sejahtera dan yang belum sejahtera. Saat ini terdapat keluarga yang sejahtera (KS-II,III dan III+) sebanyak 27.506 kk dari 40.767 kk yang ada atau sekitar 67,47 % yang semakin lama semakin meningkat. Keluarga yang memiliki kemampuan menyejahterakan keluarganya tersebut menjadi potensi yang cukup besar dalam mengembangkan strategi pemberdayaan keluarga dalam mewujudkan keluarga berkualitas.

8. Dari segi data base dan informasi kependudukan sudah memiliki berbagai sumber data baik dari catatan dan statistik administrasi kependudukan catatan sipil, hasil Sensus Penduduk, SDKI, Susenas, hasil pencatatan dan pelaporan yang dilakukan secara rutin/reguler, data mikro keluarga (hasil pendataan keluarga), serta hasil sensus, survey dan data statistik rutin sektor lainnya.
9. Dalam aspek dukungan lainnya adanya dukungan politis dan dukungan operasional dari semua pihak baik dari legislatif, pihak swasta dan berbagai lapisan masyarakat, telah memberikan perhatian, dorongan dan dukungan yang sangat besar dalam pembangunan kependudukan di Kota Bima dengan dituangkannya kedalam RPJMD. Serta adanya jaringan kelembagaan sampai tingkat lini lapangan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kependudukan seperti PPKBD, Sub PPKBD serta kader PKK, kader KB dan sebagainya.

4.2 Kendala.

Walaupun penyelenggaraan Pembangunan Kependudukan di Kota Bima yang telah memberikan dampak positif tidak terlepas dari adanya kelemahan yang dihadapi antara lain:

1. Pengendalian jumlah penduduk melalui penurunan fertilitas yang masih cukup tinggi yakni 4,89 anak mengakibatkan lambatnya kondisi penduduk tumbuh seimbang serta masih lamanya waktu akan terjadinya bonus demografi di Kota Bima yang ditandai dengan terjadinya angka ketergantungan atau *dependency ratio* yang semakin membaik
2. Tingkat efektifitas kesertaan dari PUS ber KB yang sangat rendah baik peserta KB Aktif maupun peserta KB Baru sehingga tidak banyak daya ungitnya untuk menurunkan fertilitas. Hal ini disebabkan segmentasi sasaran program belum difokuskan kepada PUS Usia Muda Paritas Rendah (PUS MUPAREN) serta peserta KB baru yang benar benar murni bukan dari peserta KB ganti cara

yang dicatat sebagai peserta KB baru, disamping itu masih ada wanita melakukan kawin pertama di usia 16-18 tahun.

3. Tingkat pendidikan penduduk yang relative masih rendah 8,9 tahun menunjukkan masih banyaknya penduduk usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan di tingkat SLTA dan Perguruan Tinggi, serta masih rendahnya minat dan perhatian untuk mengembangkan pendidikan vokasional yang menciptakan penduduk yang kreatif, inovatif, trampil dan mandiri dan mampu mengembangkan sektor industri pengolahan terhadap hasil dari sektor pertanian, perkebunan dan perikanan.
4. Masih terjadinya angka kelahiran bayi dengan gizi kurang bahkan gizi buruk yang didukung dengan fasilitas dan sarana prasarana pelayanan kesehatan yang berkualitas, murah dan mudah dijangkau termasuk Pos Pelayanan Terpadu dan sebagainya.
5. Kesadaran masyarakat yang relatif masih rendah dalam menjaga serta memelihara kesehatan keluarganya, memeriksakan ibu hamil, memeriksakan bayi serta pemberian gizi, imunisasi dan lain-lain serta lingkungan yang sehat, merokok di sembarangan tempat termasuk pengolahan limbah atau sampah.
6. Persebaran penduduk yang tidak merata serta kepadatannya yang membutuhkan penataan sehingga terciptanya keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lahan atau lingkungan.
7. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang relative masih cukup banyak 14.545 kk yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak untuk dientaskan dan ditingkatkan menjadi keluarga yang sejahtera
8. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan serta belum sepenuhnya dilakukan pelayanan administrasi kependudukan yang prima, data dan informasi penduduk yang belum terintegrasi serta pemanfaatannya dalam sistem pengambilan keputusan pembangunan berwawasan penduduk.

9. Kurangnya terjadi saling bersinergi (*Concerted Efforts*) terintegrasinya berbagai kebijakan dan program pembangunan diantara Pemangku Kebijakan Pembangunan Kependudukan (Pengendalian Kuantitas, Pengembangan Kualitas, Penataan Mobilitas, Pembangunan Keluarga dan Data Base Penduduk). Terbatasnya jumlah tenaga Penyelenggara Pembangunan kependudukan baik dalam aspek pengendalian kuantitas penduduk (tenaga lapangan KB, kader KB), aspek kualitas penduduk (tenaga medis, guru), tenaga lainnya seperti tenaga pencacah administrasi penduduk dan sebagainya.

4.3 Tantangan

Disamping kekuatan dan kelemahan yang dihadapi, Pembangunan Kependudukan di Kota Bima, masih menghadapi berbagai tantangan atau ancaman, antara lain:

1. Dalam aspek kuantitas penduduk masih terdapat kelambatan penurunan fertilitas yang cukup besar 2,48 anak yang disebabkan adanya keinginan yang kuat terhadap pengertian anak ideal yang lebih dari dua anak serta adanya dukungan budaya dan adat yang berlaku.
2. Dalam bidang kualitas penduduk khususnya pada aspek pendidikan masih belum adanya keserasian dalam pengintegrasian visi, misi serta kebijakan dan program pembangunan pendidikan nasional dari tingkat pusat, provinsi dan daerah kabupaten/kota. Demikian pula dalam aspek pembangunan kesehatan serta pembangunan dalam bidang perekonomian yang belum saling mendukung dan terintegrasi.
3. Pada aspek penataan mobilitas dan penataan kepadatan serta persebaran penduduk yang belum selaras dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan, adanya kondisi yang di beberapa kecamatan yang sudah kurang kondusif terhadap kelayakan penduduk untuk mendapatkan daya dukung dan daya tampung memadai untuk kesejahteranya sehingga menjadikan Kota Bima sebagai wilayah yang menarik minat untuk bermigrasi.

4. Tantangan yang dihadapi dari segi pembangunan keluarga, adalah kemampuan keluarga dalam menghadapi kecepatan perkembangan dan kemajuan global sehingga jika tidak diberdayakan secara dini dan baik akan menjadikan keluarga-keluarga di Kota Bima semakin rentan untuk memenuhi kebutuhan dan menjalankan fungsi keluarganya serta semakin meningkatnya keluarga yang tidak memiliki tabungan.
5. Kondisi perekonomian dunia yang memburuk serta ketidakmampuan pemerintah pusat mengatasi persoalan persoalan serta dampak ekonomi global membuat rendahnya daya beli masyarakat sehingga tingkat kesejahteraan penduduk semakin menurun, lambatnya penurunan angka kemiskinan.
6. Bervariasinya dukungan dan komitmen pemerintah Kabupaten/Kota tentang pentingnya Program Pembangunan Berwawasan Kependudukan dalam rangka pembangunan berkelanjutan.
7. Seiring dengan berkembangnya pengaruh globalisasi dan informasi dewasa ini, serta tumbuhnya nilai-nilai baru dalam pelaksanaan demokrasi dan penegakan hak-hak azasi manusia, menimbulkan pula tantangan baru dalam upaya memberikan pelayanan yang harus semakin berkualitas, dan meningkatkan perhatian terhadap pemenuhan dan hak-hak penduduk, serta semakin derasnya arus informasi dan globalisasi akan berdampak pula terhadap masuknya nilai-nilai baru yang tidak sesuai dengan nilai luhur budaya bangsa, yang akan mengancam ketahanan keluarga.

4.4 Peluang

Dalam melaksanakan pembangunan kependudukan, banyak peluang - peluang yang dapat dimanfaatkan antara lain :

1. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka semakin jelas kewenangan serta pembagian urusan serta menjadikan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nasional menjadi salah satu urusan wajib bagi daerah kabupaten/kota serta adanya kelembagaan yang mengurusinya.

2. Komitmen Pemerintah yang semakin tinggi terhadap pembangunan Kependudukan dan KB menjadi bagian dari prioritas nasional maupund aerah yang dituangkan dalam RPJMN dan RPJMD serta berbagai idokumen perencanaan nasional maupun daerah.
3. Berbagaisumberpembiayaan yang tersediabaik APBN, APBD, DAK, ADDes serta berbagai sumber keuangan masyarakat yang dapat menjadikan Program Pengendalian Penduduk, KB dan Pembangunan Keluarga semakin baik.
4. Perubahan sikap dan prilaku masyarakat yang mendukung upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas, serta menekankan kembali peran dan fungsi keluarga dalam upaya meningkatkan kualitas penduduk dan keluarga melalui peningkatan pendidikan, pengetahuan, status kesehatan, serta pendapatan keluarga. Sikap dan perilaku yang kondusif masyarakat ini memberikan peluang bagi upaya-upaya pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan keluarga dan meningkatkan kesejahteraannya, terutama dalam memberikan peran dan kedudukan perempuan sebagai mitra sejajar kaum pria dalam segala aspek kehidupan, baik sosial, politik, ekonomi maupun budaya.
5. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya pengembangan dalam memberikan peluang bagi upaya-upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi serta mutu pelayanan pembangunan kependudukan. Selain itu perkembangan tehnologi informasi juga memberikan peluang mempermudah penyediaan dan akses data base dan informasi, pengembangan jaringan informasi dan komunikasi serta pemanfaatannya, termasuk penyediaan data mikro keluarga bersekala nasional. Disamping itu, pengembangan tehnologi tepat guna yang mampu menyediakan perangkat yang dibutuhkan bagi pembangunan berwawasan kependudukan.
6. Meningkatnya dukungan dan partisipasi para mitra kerja dalam mendukung penyelenggraan pembangunan kependudukan serta sumbangan pemikiran dan kajian ilmiah dari Universitas/Perguruan Negeri maupun swasta para Tokoh Lintas Agama dan para Stakeholders lainnya.

7. Keberadaan pusat pelatihan dan penelitian berbagai program dalam Pembangunan Kependudukan. Dukungan komitmen Internasional, yaitu adanya dan disetujuinya oleh Pemerintah Indonesia berbagai komitmen dan kesepakatan internasional seperti ICPD Cairo tahun 1994, dan MDGs tahun 2000, yang memberikan dasar kerjasama upaya global untuk meningkatkan kualitas dan hak-hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, kesetaraan Gender, peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.